

Accountability Brief

Penanggung Jawab:
Inosentius Samsul
(Kepala Badan BK DPR RI)
Tim Penulis:
Djustiawan Widjaya
Yunita Romauli Nababan
Tri Purwita Sari

Tumpang Tindih Pembangunan dalam Kawasan *Food Estate* di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah

Isu Strategis

Program Peningkatan Pangan nasional atau *Food Estate* kini telah memasuki tahun kedua sejak ditetapkan sebagai salah satu dari sepuluh Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. *Food Estate* dikembangkan dalam bentuk usaha pertanian skala besar dengan lahan minimal 2.000 hektar berbasis klaster dan multikomoditas seperti tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan melalui pemanfaatan sumber daya yang optimal yakni SDM yang berkualitas, penggunaan teknologi yang tepat guna dan berwawasan lingkungan serta korporasi petani. Hasil dari *food estate* diharapkan dapat meningkatkan cadangan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi impor produk pangan dan pertanian. Pembangunan kawasan *food estate* melibatkan Kementerian/Lembaga lintas sektor, salah satunya Kementerian Pertanian (Kementan) yang berperan untuk menata kawasan dan mengembangkan sarana dan prasarana pertanian, meningkatkan kapasitas dan diversifikasi produksi, dan mengembangkan SDM dan korporasi petani.

Tahun 2020 dan 2021 Kementan melaksanakan pembangunan kawasan *Food Estate* di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Kapuas dan Pulau Pisang Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk mendukung perencanaan pembangunan di lokasi tersebut, Kementan telah menyusun buku Desain Pembangunan Kawasan *Food Estate* Berbasis Hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan dan buku *Grand Design* Pengembangan Kawasan *Food Estate* Berbasis Korporasi Petani di Lahan Rawa Kalimantan Tengah yang terbit pada Desember 2020. Namun, belum ada buku desain pembangunan kawasan *Food Estate* di Kabupaten Sumba Tengah.

Pembangunan kawasan *Food Estate* di Humbang Hasundutan dialokasikan seluas 1.000 Hektar di tahun 2020 yang dimanfaatkan untuk komoditas hortikultura prioritas yaitu bawang putih, bawang merah dan kentang. Namun hingga saat ini baru 215 hektar yang telah digarap oleh Kementan dengan rincian:

- 200 hektar untuk kegiatan budi daya hortikultura oleh kelompok tani yang mendapat sarana budi daya seperti benih, dolomit, pupuk, herbisida dan pestisida dari Direktorat Jenderal Hortikultura (Ditjen Hortikultura);
- 15 hektar untuk kegiatan *Demonstrasi Farming (demfarm)* oleh Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Badan Litbang Pertanian. Dalam lahan tersebut dilakukan penyusunan desain air dan teknik irigasi yang dilaksanakan oleh Kebun Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (IP2TP) Berastagi. Selain itu, terdapat pembangunan jaringan irigasi oleh Direktorat

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) untuk mendukung penyediaan air pada lahan *demfarm*.

Pembangunan Kawasan *Food Estate* di Kalimantan Tengah dialokasikan seluas ±770.600 hektar yang sebagian besar berlokasi di lahan eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) untuk dimanfaatkan sebagai lahan sawah untuk komoditas padi. Adapun kegiatan utama Kementan pada tahun 2020 adalah intensifikasi lahan sawah dengan target seluas 30.000 hektar. Kemudian di tahun 2021 intensifikasi lahan sawah dengan target 14.135 hektar dan ekstensifikasi lahan sawah dengan target seluas 22.500 hektar. Hal ini didukung oleh sumber daya air yang melimpah dari sungai besar seperti Kapuas, Kahayan dan Sebangau yang dapat digunakan untuk mengairi lahan rawa dalam kawasan *food estate*. Intensifikasi lahan sawah dilakukan melalui perubahan pola budi daya dari satu kali tanam dalam satu tahun menggunakan varietas padi lokal menjadi dua kali tanam dalam satu tahun menggunakan varietas padi unggul.

Permasalahan

Berdasarkan pemeriksaan BPK RI dalam LHP DTT atas Perencanaan, Pelaksanaan, dan Monitoring Evaluasi Program Pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan/*Food Estate*, terdapat tumpang pembangunan Kementan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di kawasan *Food Estate* Humbang Hasundutan, Sumatera Utara dan Kecamatan dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah yang menyebabkan tidak optimalnya terlaksananya *Food Estate* yaitu:

1. Pembangunan jalan oleh Kementerian PUPR di Kabupaten Humbang Hasundutan memotong dan menutup jalur pengelolaan air dan irigasi yang telah dikerjakan oleh IP2TP Berastagi dan Ditjen PSP. Hal ini menyebabkan lahan *demfarm* seluas 15 Hektar tidak optimal dalam budi daya hortikultura karena jaringan tata kelola air tidak berfungsi. Hal ini juga berarti terdapat pemborosan keuangan negara senilai Rp1.559.082.000,00 yang terdiri dari biaya realisasi pengelolaan air dan teknik irigasi oleh IP2TP Berastagi sebesar Rp1.059.082.000,00 dan pembangunan jaringan irigasi oleh Ditjen PSP sebesar Rp500.000.000,00
2. Pembangunan Infrastruktur oleh Kementerian PUPR di Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas membuat pelaksanaan budi daya pertanian tidak berjalan dengan optimal dengan detail sebagai berikut:
 - a. Penutupan sementara saluran air sekunder dan tersier dalam rangka pembangunan pintu air menyebabkan air di saluran sekunder dan tersier tidak mengalir dan dipenuhi air saat musim hujan. Dengan karakteristik tanah yang memiliki porositas besar membuat air kembali ke lahan dan membuat lahan tergenang, hal ini mengakibatkan bahan organik dalam lahan gambut terdekomposisi secara anaerobik yang menghasilkan unsur asam yang sangat buruk untuk tanaman. Kondisinya, di lahan tersebut tengah dilakukan perubahan pola budi daya pertanian dengan menerapkan dua kali musim tanam menggunakan varietas padi unggul. Namun, varietas padi unggul tidak tahan dengan genangan air dalam jangka waktu yang lama sehingga produksi tidak optimal sehingga petani lebih memilih menggunakan varietas padi lokal yang lebih adaptif terhadap kondisi tata kelola air tersebut. Jadi, dapat disimpulkan perubahan pola budi daya pertanian yang bertujuan untuk peningkatan produksi yang dilakukan bersamaan dengan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur tata kelola air tidak menghasilkan produksi yang optimal.
 - b. Kondisi jalan usaha tani sebagai akses menuju lahan pertanian saat ini sulit dilalui terutama saat musim hujan, hal ini terjadi karena jalan tersebut dipakai untuk akses alat berat konstruksi yang mengerjakan saluran air tersier. Selain itu, terdapat jalan usaha tani yang dibongkar dalam rangka pembangunan konekting saluran kuarter. Jalan usaha tani tersebut mulai terputus atau dibongkar pada bulan Agustus dan September 2020. Berdasarkan pemeriksaan fisik pada bulan November 2021 di Desa Harapan Baru, Desa Bentuk Jaya dan Desa Manuntung bersama Koordinator Penyuluh Kecamatan Dadahup dan PPK Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok A terdapat

total 181 titik jalan usaha tani yang terputus. Kondisi ini menyebabkan petani kesulitan mengakses lahan pertanian untuk melakukan budi daya lahannya.

Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan tersebut, Komisi IV DPR RI mendorong Kementan agar bersama-sama menyusun desain pembangunan kawasan *Food Estate* di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini dan melakukan koordinasi lintas K/L termasuk Kementerian PUPR supaya tidak terjadi tumpang tindih aktivitas pembangunan yang menyebabkan produksi tidak optimal dan pemborosan keuangan negara. Terkait kondisi tata kelola air yang belum berfungsi optimal akibat kegiatan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah, Kementan diharapkan dapat membuat perencanaan pola budi daya yang dapat diterima dan adaptif terhadap kondisi lingkungan tersebut. Dengan demikian, tujuan pembangunan *food estate* dapat tercapai pada akhir tahun 2024 dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional.

Referensi

Biro Perencanaan Kementerian Pertanian . (2020). *Grand Design Pengembangan Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Petani di Lahan Rawa Kalimantan Tengah*. Jakarta: Biro Perencanaan Kementerian Pertanian.

BPK RI. (2021). *LHP DTT atas Perencanaan, Pelaksanaan, dan Monitoring Evaluasi Program Pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan/Food Estate*. Jakarta: BPK RI.